

Nomor : B/ 214 /AA.05/2022

7 Maret 2022

Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah

Yth. Wali Kota Dumai

di

Dumai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Dumai Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Dumai memperoleh nilai **63,77** atau predikat "**B**". **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Dumai masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:**

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,23	21,49
b.	Pengukuran Kinerja	25	12,94	13,76
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,8	11,03
d.	Evaluasi Internal	10	6,06	6,17
e.	Capaian Kinerja	20	11,3	11,32
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>61,33</b>	<b>63,77</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Uraian singkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Dumai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Dumai belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi tahun 2020, sehingga belum terjadi peningkatan dalam implementasi SAKIP yang signifikan.
2. Kelemahan yang masih dijumpai antara lain sebagai berikut:
  - a. Dokumen perencanaan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya memiliki tujuan dan sasaran strategis yang mampu menjawab isu strategis yang dihadapinya. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan tidak memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat;
  - b. Penjabaran kinerja masih berorientasi pada pembagian urusan sehingga hubungan lintas fungsi antar OPD yang dibutuhkan belum terlihat dalam proses pencapaian kinerja. Hal ini dikarenakan prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penyusunan penjabaran kinerja;
  - c. Keterlibatan pimpinan OPD dalam penetapan kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencapaian kinerja belum sepenuhnya terlihat. Hal ini mengakibatkan Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga SAKIP masih belum terimplementasi secara maksimal;
  - d. Keterlibatan aktif pimpinan OPD belum terlihat dalam proses pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi efektifitas program dan kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja, serta dalam hal pengambilan keputusan strategis lain yang diperlukan;
  - e. Umpan balik dari laporan kinerja yang berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi pencapaiannya belum dirumuskan dengan baik sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam pengungkapan informasi pada laporan kinerja;
  - f. Hasil evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dilakukan oleh Inspektorat terhadap OPD belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan; dan
  - g. Pelaksanaan implementasi SAKIP belum mampu secara nyata memberikan kontribusi dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih meningkatkan AKIP di Pemerintah Kota Dumai, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan revidi dan perbaikan dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja;
2. Memastikan keselarasan antara sasaran strategis dan program/ kegiatan di bawahnya untuk mengefektifkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja. Hal tersebut dilanjutkan dengan melakukan pengukuran efisiensi yang didasarkan pada perbaikan manajemen kinerja. Melakukan penyempurnaan atas penjabaran kinerja yang telah ada dengan memastikan kesesuaiannya dengan PermenPAN-RB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
3. Mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam proses penetapan kinerja untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada pimpinan OPD dan pegawai pada setiap level organisasi;
4. Meningkatkan keterlibatan pimpinan OPD dalam proses pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan serta dalam pengambilan keputusan strategis terkait efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh termasuk dalam pemberian *reward and punishment* dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih maksimal;
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja serta strategi yang dibutuhkan dalam upaya pencapaian kinerja selanjutnya;
6. Meningkatkan kapasitas evaluator sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja OPD dalam proses pelaksanaan evaluasi internal AKIP. Hal juga perlu didukung dengan proses pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi; dan
7. Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan



**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Riau.